



Lemhannas RI

Tanhanna Dharmma Mangrva

Edisi 76, November 2015



Sinergisme Intelegen Negara Dalam Mendukung Keamanan Nasional
hal 3



Komitmen Menuju Lembaga Bertaraf Internasional
hal. 6



"Memetik Sasando di Nusa Lontar" Menjadi Yang Terbaik
hal. 9



Sinergi Humas untuk Optimalkan Pengelolaan Komunikasi Publik
hal. 12



Pembekalan Presiden RI untuk Peserta PPRA LIII dan PPSA XX

Presiden Jokowi berpesan kepada para peserta program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) terkait ketatnya kompetisi antar negara "Persaingan, begitu juga gesekan dan benturan-benturan itu, sangat kelihatan sekali," jelas Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) saat menerima peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX Lemhannas, di Istana Negara (4/11).....(selengkapnya hal. 4)

Photo : Humas Lemhannas RI

Daftar Isi:

Bagus Puruhito Jabat Wakil Gubernur Lemhannas Yang Baru...hal 2

Sinergisme Intelejen Negara Dalam Mendukung Keamanan Nasional ...hal 3

Pembekalan Presiden RI untuk Peserta PPRA LIII dan PPSA XX...hal 4

PPSA XX Resmi Ditutup, Gubernur Lemhannas RI Ingatkan Kewajiban Moral...hal 5

Komitmen Menuju Lembaga Bertaraf Internasional...hal 6

Perhatian Serius Terhadap Gatra Sosial Budaya dan Ideologi...hal 7

Simone Wilkie Kunjungi Lemhannas RI...hal 8

"Memetik Sasando di Nusa Lontar" Menjadi Yang Terbaik...hal 9

Langkah Strategis UMKM Hadapi MEA 2015...hal 10

Perlu Bersikap Optimis dan Hati-Hati Hadapi Krisis Ekonomi Global...hal 11

Sinergi Humas untuk Optimalkan Pengelolaan Komunikasi Publik ...hal 12

Tim Redaksi:

Pengarah:

Suhardi Alius

Penanggung Jawab:

E. Estu Prabowo

Redaktur Pelaksana:

Wahyu Widji Pamungkas

Penyunting/Editor:

Bambang Iman Aryanto

Staf Redaksi:

Trias Noverdi, Aditya Solehah, Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia, Nia Yola

Desain:

Bambang Iman Aryanto

Fotografer:

Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto

Sekretariat:

Linda Purnamasari, Gatot, Indah Winarni

Distribusi:

Sumurung, Supriyono

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

Bagus Puruhito Jabat Wakil Gubernur Lemhannas Yang Baru



“Kehadiran Wakil Gubernur yang baru Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, diharapkan mampu mengakselerasikan berbagai program kegiatan untuk menggairahkan kerja serta capaian kinerja ke depan. Dengan dukungan seluruh pejabat Lemhannas yang memiliki pengalaman beragam, sekiranya dapat menghadirkan pemikiran-pemikiran cemerlang akan pencapaian prestasi Lemhannas”, demikian ujar Gubernur Lemhannas RI pada upacara pelantikan Wakil Gubernur Lemhannas RI di Ruang Nusantara Gd. Trigatra Lt. I, Jakarta.

Gubernur menambahkan, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas yang dilandasi dengan konsistensi terhadap komitmen bersama merupakan kata kunci yang menentukan keberhasilan Lemhannas RI dalam manajemen tugas untuk mendidik kader pimpinan tingkat nasional, melaksanakan kajian strategis maupun pementapan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat.

Sebagai Wakil Gubernur yang baru diperlukan dedikasi dalam mengemban tugas dan pengabdian melalui waktu, tenaga, dan pikiran. Selain itu, juga diperlukan perencanaan dan pengawasan dalam peningkatan SDM, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan perkantoran merupakan upaya jangka panjang yang didukung dengan kerja keras secara bersama-sama.

Upacara pelantikan, pengangkatan sumpah janji, serah terima jabatan, dan pelepasan Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. yang diangkat sebagai Kepala Staf Umum TNI dihadiri Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., para Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip, Asisten Personil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsda TNI Eko Edi Santoso, S.I.P., serta Pejabat Struktural Lemhannas RI. Pelantikan Wakil Gubernur yang baru tersebut ditandai dengan penyematan dan penanda tangan serah terima jabatan.



Sinergisme Intelejen Negara Dalam Mendukung Keamanan Nasional



“P emahaman mengenai intelejen yang masih simpang siur pada dasarnya memiliki peranan penting bagi masyarakat menyangkut pengambilan keputusan yang dijabarkan sebagai kepentingan nasional, apalagi harus menghadapi kondisi ambigu yang memungkinkan pemerintah sulit mengambil keputusan terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara,” demikian ucap Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dalam acara pembukaan *Round Table Discussion* (RTD) kajian aktual yang mengangkat tema **“Membangun Sinergitas Intelejen Negara Guna Mendukung Keamanan Nasional NKRI dalam Rangka Ketahanan Nasional”**, pada Rabu (4/11).

Selanjutnya dalam paparan Direktur Keamanan Negara Badan Intelejen Keamanan Polri Brigjen Pol. Drs. S. Harunantyo, menyampaikan beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya koordinasi sinergisme intelejen dalam menghadapi tantangan terhadap keamanan dan pertahanan NKRI mencakup beberapa aspek diantaranya aspek regulasi, aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek anggaran, dan aspek infrastruktur dan teknologi.

Badan Intelejen Negara (BIN) sebagai koordinator penyelenggara intelejen negara memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi utama yaitu menjaga kepentingan dan keamanan nasional dari berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG). Mengingat eksistensi negara terus berhadapan dengan modus baru terkait masalah politik, separatisme, subversi asing, terorisme, *cyber war*, kejahatan transnasional, konflik nasional, dan

lain sebagainya, maka BIN diharapkan dapat memberikan *assesment* terhadap user berupa *early warning*, *forecasting* dan *problem solving*.

Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. menyampaikan ada beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya sinergisme intelejen negara yaitu adanya kelemahan mendasar dalam hal regulasi manajemen, organisasi, infrastruktur, egosektoral dan anggaran. Oleh karena itu, *smart* intelejen dalam fungsi intelejen sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran intelejen dalam menghadapi ancaman.

Regulasi tambahan untuk penguatan intelejen harus segera dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas intelejen demi kepentingan nasional, perubahan gelar perang yang dinamis dalam bentuk *hybrid war*, *proxy war*, dan *cyber war* harus menjadi perhatian utama dalam pendidikan personel intelijen dan perlu dipertimbangkan adanya *leading sector* yang mengelola semua kegiatan intelijen untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hadir sebagai pembicara Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen TNI Moh. Erwin Syafitri, Direktur Keamanan Negara Badan Intelejen Keamanan Polri Brigjen Pol. Drs. S. Harunantyo, dan Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN Brigjen TNI. CH. Halomon Sidabutar. Sebagai penanggung utama Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq, Pengamat Intelejen Andi Widjajanto, dan Tenaga Profesional Bidang Pimnas dan Sismennas Lemhannas RI serta penanggung lainnya.

Pembekalan Presiden RI untuk Peserta PPRA LIII dan PPSA XX



Foto : Humas Lemhannas RI

Presiden Jokowi berpesan kepada para peserta program pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) terkait ketatnya kompetisi antar negara “Persaingan, begitu juga gesekan dan benturan-benturan, itu sangat kelihatan sekali,” jelas Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) saat menerima peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIII dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX Lemhannas, di Istana Negara (4/11).

Sebelumnya, Gubernur Lemhanas, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA melaporkan, PPSA XX menempuh pendidikan selama 5,5 bulan yang dimulai pada 11 Mei dan akan berakhir pada Kamis (5/11). PPSA XX, lanjut Gubernur, diikuti oleh 79 peserta yang merupakan pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan TNI, Polri, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan akademisi. Selain itu, juga ada 11 peserta yang berasal dari luar negeri diantaranya Myanmar, Kamboja, Aljazair, Zimbabwe, dan Malaysia.

Sementara jumlah alumni PPRA LIII sebanyak 117 terdiri dari pejabat pemerintah setingkat eselon II dan dari TNI/Polri, kementerian lembaga, ormas, partai politik, tokoh masyarakat,

dan 11 orang dari negara lain, yakni dari Singapura, Thailand, Myanmar, Kamboja, Srilanka, Timor Leste, Papua Nugini, Australia, Aljazair dan Zimbabwe.

Selanjutnya Presiden Jokowi memberikan bekal kepada para peserta PPRA LIII dan PPSA XX Lemhannas RI tahun 2015 mengenai kompetisi negara dalam bidang perekonomian, Jakarta, Rabu pagi di Istana Negara.

Presiden Jokowi berharap, sejalan dengan program revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah, diharapkan para peserta memanfaatkan pendidikan di Lemhannas RI sebagai sarana untuk melatih diri dalam rangka meningkatkan kualitas mental dan karakter sebagai pemimpin yang negarawan.

Turut hadir dalam pembekalan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., Sekretaris Kabinet Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M., Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekretaris Utama Lemhannas RI, Para Deputy, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional dan Pejabat Struktural Lemhannas RI lainnya.



PPSA XX Resmi Ditutup, Gubernur Lemhannas RI Ingatkan Kewajiban Moral



Kamis (5/11), “Saya sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan para peserta PPSA XX, yakni dengan intens memantapkan wawasan dan bekal pengetahuannya selama dalam pendidikan di Lemhannas hingga menuangkan pemikirannya ke dalam puncak pendidikan yaitu seminar nasional yang mengangkat tema Indonesia sebagai poros maritim dunia” ujar Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. pada Penutupan PPSA XX di Ruang Dwi Warna Gd. Pancagatra Lt. I, Jakarta.

Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX, lanjut Gubernur, diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuannya sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila.

Ada hal penting yang harus diingat para peserta yang telah lulus dari pendidikan diantaranya adalah kewajiban moral dalam menjalani peran, tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawab dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peserta PPSA yang telah lulus secara otomatis masuk ke dalam Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) yang merupakan wadah perhimpunan alumni Lemhannas sebagai forum komunikasi dan silaturahmi.

Berikut beberapa program yang akan dilakukan kepengurusan IKAL PPSA XX yang memiliki visi agar terciptanya kebersamaan yang hakiki untuk membangun bangsa yaitu melaksanakan program yayaan alumni PPSA XX, dibentuk 20 Gemilang alumni, serta memberikan pendidikan kepada putra-putri alumni PPSA XX.

Ketua Umum IKAL Agum Gumelar berpesan, “Jadilah calon pemimpin dan staf yang baik, bijak, elegan, dan beretika”. Penutupan acara tersebut ditandai dengan penanggalan tanda peserta, penyematan pin Lemhannas RI, penyerahan sertifikat, dan pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A, Sekretaris Dewan Pengarah Dr. Ardi Partadinata, M.H., Sekretaris Utama Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta Pejabat struktural Lemhannas RI.



Foto : Humas Lemhannas RI

Komitmen Menuju Lembaga Bertaraf Internasional

Kamis (5/11), Gubernur Lemhannas RI membuka diskusi *Refocusing World Class Institution (WCI) Lemhannas 2015-2024* yang dipaparkan oleh Tim Pokja WCI dengan komitmen untuk menguatkan peran dengan menetapkan arah strategis Lemhannas RI menuju lembaga berkelas dunia yang telah dirancang dari tahun 2011, diharapkan dapat menyamakan pemikiran/pandangan mengenai WCI tersebut.

Terdapat tiga fokus perubahan untuk mencapai harapan dan komitmen menuju lembaga yang bertaraf internasional diantaranya, Pertama, menyangkut kurikulum pendidikan (modul, partisipasi peserta negara sahabat, kualitas dan aksesibilitas publik terhadap kajian, jurnal publikasi Lemhannas, kualitas tenaga pengajar, pengkaji, profesional serta kualitas narasumber), Kedua, infrastruktur non fisik (menyangkut SDM, *political building*, *political will*, dan ketersediaan anggaran yang memadai), dan Ketiga, infrastruktur fisik (menyangkut lahan, gedung, fasilitas informasi dan teknologi).

“Untuk mewujudkan lembaga yang bertaraf internasional membutuhkan rujukan kurikulum yang jelas dan penajaman grand design dan organisasi dengan acuan

prioritas lembaga” ujar Deputy Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Nasir Majid. Menanggapi pernyataan tersebut, Deputy Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr menambahkan, “akselerasi WCI harus memiliki sinkronisasi antara visi dan misi secara eksplisit (bagi konseptor dan aktor) harus diperhatikan *outcome* dari penerapan tiga perubahan (KPI, Infrastruktur Non fisik, dan infrastruktur fisik)”.

Kondisi Lemhannas RI menuju WCI dapat dicapai dengan komitmen yang kuat dari pimpinan serta dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota Lemhannas RI yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam proses pencapaian menuju *World Class Institution*, sasaran yang telah ditetapkan dari setiap tahapan dapat disesuaikan dengan tantangan perkembangan lingkungan strategis. Dengan demikian, terwujudnya Lemhannas RI sebagai Lembaga berkelas dunia sekaligus membuka peluang untuk berkompetisi di kancah persaingan global dengan memahami aspek penting yaitu SDM, proses belajar-mengajar, sarana dan prasarana, hasil kajian, kualitas lulusan, jaringan kerja sama, dan persepsi masyarakat.



Perhatian Serius Terhadap Gatra Sosial Budaya dan Ideologi



Foto : Humas Lemhannas RI

Selasa(10/11), lima tahun terakhir potret ketahanan nasional Indonesia masih berada pada posisi kurang tangguh walaupun sampai dengan tahun 2014 Indeks Komposit Ketahanan Nasional mengalami peningkatan. Gatra ideologi dan gatra sosial budaya memerlukan perhatian serius karena kedua gatra tersebut adalah gatra yang sangat strategis dalam ketahanan nasional tetapi indeks kompositnya paling rendah di antara gatra-gatra lainnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi kesejahteraan yang diukur dari integrasi nasional. "Negara bisa dikatakan makmur jika mampu mengelola potensi kekayaan alam menjadi aset untuk pembangunan" pungkas Deputy Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseno Marseno, M.Agr.

Terkait isu strategis mengenai validasi, Deputy Pengkajian Strategik menjelaskan bahwa kekacauan yang disebabkan karena ketidakadilan disebabkan oleh prioritas kepentingan yang tidak mengutamakan kepentingan untuk tujuan bangsa.

Enny Sri Hartati Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku narasumber mengatakan, indikator permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi diantaranya, ketidakpastian ekonomi global dan integrasi ekonomi, perlambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang menurun, tekanan inflasi *volatile food*,

instabilitas nilai tukar, target penerimaan negara yang tidak tercapai, pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan meningkat.

Sementara itu, Isu-isu yang berkembang sepanjang tahun 2014 menghasilkan kesimpulan bahwa masih melemahnya kinerja ekonomi makro, kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar daerah, nilai-nilai kebangsaan, *food, energy and water security*, sinergi kebijakan, birokrasi, infrastruktur wilayah, lingkungan, kapasitas dan kualitas sumber kekayaan alam.

Pada kesempatan itu, Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Tenaga Profesional Bid. SKA memaparkan metodologi dan hasil pengukuran ketahanan nasional Indonesia dari tahun 2011 hingga 2014 yang ditinjau dari beberapa aspek geografi, SKA, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Data disajikan berbentuk indeks serta gambar secara rinci provinsi-provinsi untuk mengetahui apakah indeks ketahanannya (tangguh, kurang tangguh, hingga rawan).

Diskusi yang diselenggarakan di Ruang Gatot Kaca Gd. Astagatra Lt. III tersebut dihadiri Sekretaris Utama, Para deputy, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta penanggap yang dimoderatori oleh Brigjen TNI (Purn) Agus Susarso, M.Eng. Sc., M.M.



Simone Wilkie Kunjungi Lemhannas RI

Rabu (11/11), Komandan ADC (Australia Defense College) Australia MG. Simone Wilkie menyambangi Lemhannas RI untuk melakukan *Courtesy Call* (CC) mengenai lanjutan diskusi CDSS dan Lemhannas disambut oleh Gubernur Lemhannas RI bersama dengan Sekretaris Utama, Tenaga Ahli Profesional Bidang Strategi dan Hubungan Internasional dan Kepala Biro Humas Lemhannas di Ruang Tamu Gubernur Gd. Trigatra Lt. I.

"Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk beroperasi pada tingkat strategis dalam lingkungan

keamanan kompleks dan modern. Diharapkan dengan kerja sama yang dilakukan dapat untuk berpartisipasi secara terbuka yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman, dan untuk memaksimalkan CDSS dalam membahas topik yang sedang hangat dibicarakan kemudian didiskusikan untuk menghasilkan perspektif dari persoalan yang dihadapi", ujar Simone Wilkie.

Sementara itu, kunjungan Simone Wilkie dalam rangka melanjutkan diskusi yang pernah dilakukan pada Oktober 2015 berupa diskusi dengan para peserta PPRA LIII untuk

mengetahui perspektif mengenai poros maritim dan kawasan Laut Tiongkok Selatan, khususnya, dengan kerja sama mengenai *maritime security*, karena melihat posisi Indonesia yang strategis.

Simone Wilkie hadir didampingi Delegasi ADC diantaranya Defense Attache BG. John L. Gould, Counselor Defense Policy Kieran O'Leary, Policy Officer Indonesian Desk International Policy Division Australian DoD Jessica Kerr, dan Director Defense Cooperation Liaison Office Paige Witarnen.



“Memetik Sasando di Nusa Lontar” Menjadi Yang Terbaik



Foto : Humas Lemhannas RI

Senin (15/11), Awards Night Kompetisi Film Dokumenter Eagle Award (*Eagle Award Documentary Competition*) 2015 yang diselenggarakan di Grand Studio Metro TV merupakan malam penanugerahan film dokumenter bertajuk Merajut Indonesia dengan tujuan agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami nilai-nilai kebangsaan dengan keberagaman suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya.

Mengenai tema kebangsaan dalam kompetisi Eagle Award kali ini, Direktur Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. dalam sambutannya menyampaikan “tema nilai kebangsaan, dan jati diri bangsa dalam pemutaran film dokumenter ini nantinya tergambar akan seperti apa Indonesia pada tahun 2045”.

Suryo Pratomo selaku Direktur Utama Pemberitaan Metro TV mengatakan, bekerja sama dengan Lemhannas RI merupakan cara yang berbeda untuk mengajak anak-anak muda dan semua pemangku kepentingan berbicara soal kebangsaan

Penganugerahan *Eagle Award* 2015 “Merajut Indonesia” Kategori Film Favorit diberikan kepada Visian Pramudika dan Diana Noviana dengan judul Tinta Perajut Bangsa, Kategori Rekomendasi Juri diberikan kepada Debi Ahyard Rinaldi dan Runnyati Tahir dengan judul Sekolah Tapal Batas, dan untuk Kategori Film Dokumenter Terbaik Eagle 2015 diberikan kepada Wisnu Dwi Prasetyo dan Ryan Rinaldy dengan judul Memetik Sasando di Nusa Lontar.

Acara Awards Night Eagle 2015 dimeriahkan oleh Gamaliel Audrey Cantika, Nowela dan Husein X-Factor Indonesia dan ditutup dengan pemberian penghargaan dan hadiah kepada pemenang film dokumenter. Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Metro TV Adrianto Machribie, Direktur Utama Pemberitaan Metro TV Suryo Pratomo, Kioen Moe Ketua Eagle Institute Indonesia selaku penyelenggara EADC 2015, Juri Eagle Award 2015, Aktris Senior Christine Hakim, Sutradara Hanung Bramantyo, Produser Saroengallo, Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. mewakili Gubernur Lemhannas RI serta para Pejabat Struktural Lemhannas RI.



Foto : Humas Lemhannas RI

Langkah Strategis UMKM Hadapi MEA 2015

Kamis (12/11), perlu langkah strategis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menciptakan kemandirian ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Langkah strategis dapat berupa pendekatan multi dimensi diantaranya peningkatan wawasan para pelaku UMKM dan peluang usaha, peningkatan efisiensi dalam proses produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UMKM, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, dukungan terhadap akses permodalan, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif secara sinergitas dan gotong royong dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Pembahasan mengenai UMKM dan MEA ini diangkat pada *Round Table Discussion* (RTD) Kajian Aktual Ketiga mengenai Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Ruang Kresna Gd. Astagatra Lt. IV, Jakarta. Diskusi dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A, didampingi Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr, serta para Pejabat Struktural Lemhannas RI.

Sebenarnya, UMKM berperan penting di berbagai sektor ekonomi sebagai penyedia lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru, sebagai sumber inovasi. Hal ini dapat dibuktikan pada masa krisis pada tahun 1998 UMKM mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Penyebab dari timbulnya permasalahan UMKM dalam menopang pembangunan ekonomi nasional diantaranya karena iklim usaha yang belum kondusif, sektor UMKM yang

menghadapi masalah terbatasnya akses UMKM kepada teknologi dan lembaga Litbang, kurangnya kepedulian UMKM, kurangnya insentif lembaga pendukung UMKM, belum terbangun prinsip kemitraan struktur atau strategi pengembangan usaha, masih adanya gap atau kesenjangan kebutuhan UMKM, serta pengalokasian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank kepada pihak pelaku UMKM yang masih terkendala dalam hal administrasi (laporan pencatatan hasil usaha dan perizinan usaha).

“Tidak ada perubahan yang berarti dengan mengagungkan Usaha Mikro Kecil Menengah Umum (UMKM) karena produktivitas UMKM yang besar dengan usaha besar masih jauh. Persoalan krusial dari UMKM bukan terletak pada modal melainkan pada akses pasar, namun di sisi lain dalam modal adalah hambatan apabila dilihat dari ekspansinya”, ungkap Dr. Enni Sri Hartati Direktur Institute For Development of Economic and Finance (INDEF).

Hadir sebagai narasumber Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Ir. Agus Muharram, M.SP, Direktur Institute For Development of Economic and Finance (INDEF) Dr. Enni Sri Hartati, Ketua DPW Asosiasi UMKM Provinsi DKI Jakarta Mochammad Ichsan, S.E, dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Turut hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex Noerdin, Lic Econ, M.B.A, Ketua Program magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E, Pelaku UMKM/ Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Iwan Setyawan penanggung utama yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri dan Ekonomi Lemhannas RI.



Perlu Bersikap Optimis dan Hati-Hati Hadapi Krisis Ekonomi Global



Rabu (18/11), Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. membuka seminar internasional mengenai **"Strengthening ASEAN Economic Community Resilience In Facing The Global Economic Crisis"** yang diselenggarakan di Ruang Auditorium Gajah Mada Lt.III Pancagatra. Seminar nasional ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M, para Deputi, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, serta pejabat struktural Lemhannas RI.

"Perlu sikap optimis dengan berhati-hati dalam menyikapi krisis ekonomi global, jangan mau dipermainkan oleh ekonomi global karena kita tidak pernah tahu apa yang akan dihadapi ke depan dan jangan ikut agenda orang lain tanpa mikir rakyat anda karena semua punya waktu dan perlu persiapan di sektor-sektor yang tidak sama" tegas Pakar Ekonomi Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Krisis ekonomi global telah menerpa sebagian negara-negara ASEAN yang berdampak pada terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi kawasan, sehingga penguatan ketahanan ekonomi kawasan mau tidak mau menjadi tumpuan utama bagi stabilitas perkonomian kawasan maupun negara yang tergabung di dalamnya.

"Jika kita membuat satu kesimpulan tidak satu orang pun tahu bagaimana menghadapi resesi global, satu hal adalah dengan kebijakan moneter yang longgar. Kita lihat di ASEAN, ketidakseimbangan global pemain terbesar yakni Tiongkok dan AS, beberapa orang sinis, ini ketidakseimbangan AS dan Tiongkok." ujar Iwan Jaya Aziz.

Pada prinsipnya untuk perwujudan ketahanan ekonomi kawasan menuntut adanya kesamaan pandangan anantara pihak-pihak yang terlibat. Berbagai bentuk kerja sama ekonomi

seperti **Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)**, **Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)**, maupun *trans pacific partnership* tumbuh sangat pesat dalam menata dan memperkokoh ketahanan ekonom kawasan.

Dalam seminar tersebut dihasilkan empat penekanan, pertama, penguatan ketahanan ekonomi regional akan berimplikasi pada stabilitas politik dan ekonomi kawasan, kedua, ketidakseimbangan kekuatan ekonomi the great power (kekuatan ekonomi negara-negara besar) telah berdampak pada terjadinya krisis ekonomi global, ketiga, krisis global merupakan krisis multidimensi yang penyelesaiannya memerlukan sinergitas lintas sektoral dan multi disiplin ilmu, dan keempat, ASEAN maupun ASEAN + 3 terus berevolusi dan bertumbuh kembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi global.

Sebelumnya, kegiatan diawali dengan laporan Ketua Seminar Internasional Deputi Pengkajian Strategik. Seminar Nasional ini diramaikan oleh Prof. Wai Ting dari Department of Government and International Studies Hongkong Baptist University, Masahito Ambash, M.A., M. Sc dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Cornell University and Universitas Indonesia, Prof. Iwan Jaya Aziz, M. Sc., ph.D, dan Cooperation Director of ASEAN Ministry of Republic Indonesia Dr. Ir. Donna Gultom, M. Sc selaku pembicara.

Dalam diskusi terdapat beberapa penanggung yaitu Pakar Ekonomi Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Director International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) and Researcher Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Prof. Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS dan dimoderatori oleh Tenaga Pengkaji Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lemhannas RI.





Sinergi Humas untuk Optimalkan Pengelolaan Komunikasi Publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi menyampaikan pentingnya peran Humas dalam mengkomunikasikan kebijakan strategis pemerintah, “saatnya Humas Pemerintah Pusat, Humas Pemerintah Daerah, Humas Perguruan Tinggi, Humas BUMN/BUMD, serta Komunitas kehumasan, bahu membahu membangun sinergi untuk mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik”, ujarnya dalam pembukaan Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2015 di Dyandra Convention Center, Surabaya. (17/11)

Lebih lanjut Yuddy menjelaskan bahwa optimalisasi pengelolaan publik utamanya diperlukan dalam mengkomunikasikan kebijakan strategis pemerintah termasuk di dalamnya terkait Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) ASN sebagai gerakan bersama segenap komponen bangsa.

Diskusi dan pembahasan lebih mendalam terkait Revolusi Mental dilanjutkan dalam Sesi Panel I dan Tanya Jawab dengan narasumber Pokja Revolusi Mental Yudi Latif dan Staf Khusus Kepala Staf Presiden Chrisma Aryani Albandjar yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo Ismail Cawidu. Dalam sesi panel tersebut, Yudi Latif dalam paparannya ‘Peran Humas dalam Mendukung Sosialisasi Revolusi Mental’ mengungkapkan bahwa perubahan sosial saat ini harus diarahkan untuk tujuan nasional. Chrisma Aryani Albandjar menambahkan bahwa Humas dalam hal ini menjadi ujung tombak dari setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah. “Tujuan Pemerintah tidak bisa tercapai jika tidak dikomunikasikan”, ujar praktisi Humas yang memegang teguh prinsip bahwa seorang Humas sejati harus selalu dapat dihubungi 24 jam sehari ini.

Sebelumnya, Plt. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo, Djoko Agung Harijadi, dalam laporannya

menyebutkan, acara Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional 2015 yang berlangsung 17-19 November tersebut, diikuti oleh 800 peserta yang terdiri dari para pejabat kehumasan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta para praktisi komunikasi di seluruh tanah air. Selain diisi dengan seminar dan dialog, juga diselenggarakan Bakohumas Expo 2015 yang diikuti oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, Anugerah Media Humas (AMH) 2015, Pelantikan Pengurus Bakohumas periode 2015-2019, Festival Pertunjukan Rakyat, dan Stand Up Comedy.

Djoko Agung mengungkapkan bahwa penerapan konsepsi GPR membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Komunitas Humas merupakan unsur yang vital dalam melaksanakan fungsi kehumasan. Hubungan pemerintah dengan komunitas menjadi sangat penting karena kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Hal itulah yang melatarbelakangi pertemuan Bakohumas tingkat nasional tahun 2015 dengan tema “Pelaksanaan Government Public Relations (GPR) melalui Humas dan Komunitas Menuju Percepatan Revolusi Mental untuk Indonesia Hebat” tersebut.

Narasumber yang hadir berbagi pandangan dan pengalaman dalam pertemuan tersebut yaitu Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, S.H., LLM, Anggota Tim Komunikasi Presiden A.A. GN Ari Dwipayana, Direktur Komunikasi Publik Kemkominfo Tulus Subardjono, Direktur Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Siti Meiningsih, dan Tenaga Asistensi Menkominfo Bidang Komunikasi Publik Freddy H. Tulung.

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf beserta jajaran pejabat Kemenkominfo, dan Menkominfo yang menyusul hadir pada saat acara AMH dan pelantikan pengurus baru Bakohumas periode 2015-2020.